

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DIBIDANG POLITIK DAN EKONOMI MASA AWAL ORDE BARU TAHUN 1967-1971**

Bab ini akan menjelaskan alasan mengenai pengambilan keputusan Orde Baru dibidang politik dan ekonominya dalam kancah Internasional, seluruh proses pengambilan keputusan sudah barang tentu memiliki tujuan yang berjalan beriringan berdasarkan kepentingan nasional itu sendiri. Apabila sepeeninggal Orde Lama tidak segera melakukan *Recovery* diberbagai bidang akan menjadi duri dalam daging yang menurut Soeharto akan mengantarkan Indonesia kedalam jurang kehancuran.

Orde Baru dihadapkan dengan peroblem ekonomi maupun politik, konflik Regional yang merupakan akar dari prinsip politik konfrontasi yang dimasni vestasikan oleh pemerintahan sebelumnya, upaya-upaya diplomatik dilakukan demi terciptanya kondisi Indonesia yang stabil, termasuk dalam bidang ekonomi. Berorientasi keluar merupakan jurus Orde Baru untuk terbebas dari situasi terisolasi demi tercapainya tujuan nasional.

#### **A. Latar belakang lahirnya kebijakan luar negeri Indonesia**

Kekuasaan Presiden maupun lembaga kepresidenan untuk sektor politik luar negeri telah diatur oleh UUD 1945 dan perundang-undangan yang lain. Bila dilihat secara konstitusional kekuasaan diberikan amanah untuk mengelola pemerintahan terkait politik luar negeri. Bergantinya pemimpin negara republik Indonesia dibawah Soeharto tidak mengubah prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Namun Soeharto memiliki keyakinan apabila Indonesia ingin berperan penting dan efektif dalam forum Internasional, Indonesia harus memiliki daya tahan yang kuat. Hal semacam itu dapat diperoleh dari pengaturan politik dan stabilitas ekonomi dalam negeri. Oleh sebab itu Indonesia selalu berusaha menjaga stabilitas politik maupun ekonomi selama awal pemerintahan Orde Baru.

Kondisi kehidupan ekonomi maupun politik masa transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto menunjukkan suatu perubahan yang sangat signifikan, perubahan itu ditampakan melalui ekonomi universal yang sebelumnya anti asing, berpindah haluan menjadi pro terhadap mekanisme pasar. Perubahan ekonomi secara universal tersebut tentu tidak tiba-tiba terjadi. Dalam proses perubahan itu tentunya ada campur tangan kelompok yang

memenangkan gagasan tentang haluan kapitalis dan kelompok tersebut merupakan kelompok yang memiliki wawasan intelektual dan memiliki posisi penting dalam pemerintahan Orde Baru, kelompok itulah yang populer dikenal sebagai kelompok teknokrat ekonomi masa Orde Baru.

Teknokrat ekonomi Orde Baru diisi oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas dibidang ekonomi. Kelompok tersebut terdiri dari Widjojo Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardhana, J.B. Sumarlin Subroto, dan Mohammad Sadli mereka semua merupakan kelompok ekonom terdidik atas beasiswa dari Ford Foundation yang menempuh pendidikan di University of California. sebelumnya mereka merupakan guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kelompok teknokrat ekonomi memiliki peran penting dalam kisah prekonomian Orde Baru sebagai perumus kebijakan. Peran mereka dalam membuat kebijakan adalah dengan melibatkan modal asing dalam struktur prekonomian Indonesia (susanti, 2016).

Masa pemerintahan demokrasi terpimpin menyisakan persoalan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Orde Baru untuk terkhusus dalam sektor ekonomi, kegagalan Orde Lama dalam menangani prekonomian berujung pada lahirnya Inflasi di Indonesia, oleh sebab itu komitmen yang digaungkan oleh pemerintahan Orde Baru tak lain adalah untuk menyelamatkan belunggu keterpurukan ekonomi yang ditandai dengan Inflasi yang cukup tinggi. Dikutip dari Notosusanto (1992: 430) menjelaskan bahwa:

“Kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi sekitar 650% setahun tidak memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil pengertian bahwa pembangunan tak akan pernah terlaksana tanpa menyelesaikan akar permasalahan yang mendera Indonesia, tingkat inflasi yang sangat tinggi mengharuskan Orde Baru untuk melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada intinya pemerintahan Orde Baru sebagai pemegang kekuasaan, harus mengutamakan penyelamatan ekonomi untuk mengakhiri tahun-tahun suram dan menekan laju inflasi yang mencapai 650 persen. Lebih jauh Khairani dan Suprijono (2015: 272) menjabarkan bahwa :

“Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi adalah mengendalikan laju inflasi agar harga barang-barang tidak naik terus. Sedangkan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Pada hakikatnya kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi

berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil pengertian bahwa stabilisasi ekonomi yang harus dilaksanakan pemerintahan Orde Baru diarahkan kepada inflasi agar dapat dikendalikan secara efektif dan efisien dengan harapan keadaan prekonomian kembali normal. Jika inflasi dapat dikendalikan maka harga barang dan bahan pokok tidak akan melambung tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi ekonomi ialah perbaikan secara fisik pada sarana dan prasarana, alat-alat produksi yang mengalami kerusakan maupun yang sudah tak layak pakai. Stabilisasi dan rehabilitasi merupakan sebuah pemeliharaan sistem prekonomian berdasarkan kondisi yang terjadi pada era awal Orde baru dengan berkaca pada sistem prekonomian yang buruk pada pemerintahan sebelumnya.

Kabinet Ampera yang dibentuk pada 28 Juli 1966 diberi tugas pokok yakni menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik. Dalam menciptakan stabilitas ekonomi melihat kondisi ekonomi yang buruk ditandai dengan situasi hiperinflasi, hal tersebut membuat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara menyatakan perlu diadakannya landasan baru untuk melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, maka dikeluarkanlah ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan yang pada hakekatnya merupakan suatu konsepsi yang tepat untuk menanggulangi kemerosotan ekonomi. Dalam hal ini seluruh kebijakan pemerintahan Orde Baru difokuskan dalam upaya penyelamatan ekonomi nasional dengan cara stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Dikutip dari Notosusanto (1992: 432) menyatakan bahwa :

“MPRS menyadari bahwa kemerosotan ekonomi yang berlarut-larut itu disebabkan oleh : (a) tidak adanya pengawasan yang efektif dari DPR terhadap kebijakan ekonomi, (b) kepentingan ekonomi dikalahkan oleh kepentingan politik, (c) pemikiran ekonomi yang rasional untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dikesampingkan”.

Dari uraian tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa persoalan yang terjadi pada masa awal pemerintahan Orde Baru adalah bagaimana mengatasi masalah yang diwariskan pemerintahan sebelumnya dalam hal ini difokuskan untuk mengatasi persoalan dalam bidang ekonomi, ekonomi Indonesia yang buruk dilatar belakangi oleh ketidak seriusan pemerintahan Orde Lama terhadap masalah ekonomi, hal tersebut selaras dengan era kepemimpinan Soekarno

yang lebih banyak mementingkan aktivitas politiknya, seperti politik konfrontasi dengan Malaysia, Nefos, Oldefos, penyelenggaraan Ganefo, dan pembentukan Conefo serta prinsipnya yang anti Barat.

Soeharto sebagai pemimpin selanjutnya menyadari bahwa sikap yang dicerminkan pada era Demokrasi terpimpin dapat merugikan Indonesia, maka dari itu, kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan pada era Demokrasi terpimpin segera dievaluasi. Kabinet Ampera yang dibentuk pada 28 Juli 1966 diberi tugas dua pokok yang dinamakan *Dwi Dharma* yakni menciptakan stabilitas politik dan ekonomi dengan empat programnya yang dinamakan *Catur Karya*. Untuk menciptakan stabilitas ekonomi dalam ketetapan MPRS sudah dinyatakan bahwa bidang ekonomi harus diutamakan dari pada bidang politik. Seperti yang dikutip dari Sabir (1987: 2019) menyatakan bahwa :

“Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966, pasal 11 menggaris bawahi bahwa usaha menanggulangi kemerosotan ekonomi dewasa ini sekaligus akan memungkinkan pembangunan secara besar-besaran dihari depan harus menduduki tempat utama dalam keseluruhan skala prioritas nasional, sehingga kepentingan dalam negeri, khususnya kepentingan ekonomi harus tegas didahulukan dari pada kepentingan politik luar negeri”.

MPRS sebagai lembaga negara menekankan bahwa prekonomian harus menjadi prioritas utama dalam seluruh misi berencana pemerintah Orde Baru. Mengingat kondisi prekonomian yang mengalami keleusan akibat tak dihiraukan kaidah-kaidah ekonomi demi politik luar negeri pada masa pemerintahan Orde Lama. Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto setidaknya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk prekonomian Indonesia.

Penyimpangan atas prinsip politik bebas aktif pada masa Demokrasi terpimpin nyatanya menimbulkan banyak problematik tersendiri pada Indonesia maka dari pada itu untuk terhindar dari pengalaman pahit pada era sebelumnya Orde baru diwajibkan melakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan Demokrasi terpimpin, agar Orde baru memiliki landasan kuat untuk melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 Tentang penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia (Notosusanto, 1992).

Sesuai dengan kepentingan Nasional maka politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif tidak dibenarkan untuk memihak pada salah satu

blok ideologi yang ada, politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif bukanlah politik yang netral namun sebuah prinsip politik yang tidak mengikat diri pada salah satu blok atau salah satu pakta militer. Dikutip dari Sabir (1987: 198) menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan politik luar negeri Orde baru berpedoman pada dua dasar pokok : (1) kepentingan nasional yang diperhitungkan secara realistis, dan (2) kenyataan dalam dunia Internasional agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan revolusi Indonesia dalam menciptakan dunia dan tata masyarakat bangsa-bangsa yang baru”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil pengertian bahwa politik luar negeri era Soeharto digunakan untuk kepentingan nasional yang telah terstruktur secara nyata, dalam korelasinya politik luar negeri Indonesia harus memiliki dampak positif bagi bangsa Indonesia tak hanya untuk menaikkan pamor saja namun memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Namun untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara politik luar negeri berpegang teguh pada Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila secara konsisten.

Aspek yang kemudian menjadi fokus Orde Baru untuk melakukan perbaikan setelah prekonomian adalah membangun politik luar negeri yang berlandaskan pada prinsip bebas dan aktif secara konsisten. Karena dalam masa demokrasi terpimpin, politik bebas dan aktif telah dibumbui dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Hal tersebut ditandai dengan lebih condongnya Indonesia kala itu kepada negara-negara komunis yang berujung pada dibentuknya poros Jakarta, Peking, Pnom Phen, Hanoi dan Pyongyang. Oleh sebab itu pada masa awal pemerintahan Orde Baru dilakukannya upaya pembenahan dalam sektor politik luar negerinya.

Prinsip berdikari atau berdiri pada kaki sendiri versi Soekarno, sejak lahirnya Orde Baru perlahan mulai ditinggalkan dan berorientasi terhadap dunia luar membuka diri seluas-luasnya dalam kancah Internasional. Sejak Soeharto berkuasa, politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan, terutama dari segi gaya dan implementasinya, hal ini dibuktikan dengan kedekatan Indonesia terhadap negara-negara Barat dalam melaksanakan politik luar negerinya. Selain itu, Indonesia juga sudah mulai menjalin hubungan bertetangga yang baik.

Pemerintah Orde Baru tidak hanya membangun citra di bidang politik Dalam pembangunan kehidupan berbangsa Dan negara, tapi juga Pembangunan sektor ekonomi. Kekuatan politik Orde Baru Kepemimpinan Presiden Suharto Mengedepankan pembangunan ekonomi sebagai fokus

utama. Yang bertujuan untuk menata kehidupan ekonomi Lebih baik lebih mudah. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memperkokoh legitimasi kekuasaan yang baru saja dicengkram serta dapat merebut simpati dari rakyat (Hadi dan Kasuma, 2012).

## **B. Kebijakan Luar Negeri Dibidang Politik**

Selain ketiga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam bidang ekonomi, semua itu tidak bisa terlepas dari pengaturan politik luar negeri yang dilakukan Indonesia. Dengan dilakukannya politik luar negeri, mempermudah negara Indonesia dalam berkomunikasi dengan negara lain, karena sebelumnya Indonesia di bawah kepemimpinan Orde Lama pernah terjadi konfrontasi hal ini disebabkan Orde Lama yang memegang prinsip anti imperialisme dan membatasi diri terhadap Negara-negara Barat. Pada masa awal pemerintahan, Soeharto membuat kebijakan yang berbeda 180 derajat dengan pemerintahan sebelumnya, seluruh kebijakan era Demokrasi Terpimpin yang menurut Orde Baru dapat merugikan segera untuk dievaluasi kembali demi tercapainya tujuan nasional, beberapa kebijakan tersebut antara lain :

### **1. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia**

Ketika Malaysia berdiri hubungan Indonesia dan negara baru Malaysia masih harmonis baru pada tahun 1963 ketika Malaysia memproklamkan berdirinya federasi Tanah Melayu Soekarno mulai geram karena dibentuknya persekutuan tanah Melayu adalah salah satu bentuk usaha-usaha dari negara-negara barat yang ingin menancapkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Semenjak tahun 1963-1966 terjadi sebuah konfrontasi secara fisik antara Malaysia dan Indonesia yang dinamakan Dwikora baik yang berbatasan darat maupun laut, ditengah konfrontasi juga terdapat beberapa perundingan-perundingan namun tidak menghasilkan apa-apa.

“Karena politik Konfrontasi dengan Malaysia, Singapura dan Inggris tidak sesuai dengan dasar politik bebas dan aktif, politik konfrontasi pun diakhiri, dan kemudian diganti dengan politik bertetangga dan bersahabat baik serta hidup berdampingan secara damai yang saling menguntungkan” (Abidin, 2019: 101).

Implementasi politik luar negeri bebas dan aktif yang tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintahan Soekarno segera dievaluasi, konfrontasi yang telah terjadi selama tiga tahun sejak 1963 pun berakhir ditangan Orde Baru diganti dengan prinsip bertetangga baik, saling menghormati satu sama lain,

menciptakan perdamaian dan melakukan hubungan yang saling menguntungkan. faktor ekonomi pun menjadi pertimbangan mengapa konfrontasi dengan Malaysia harus segera dihentikan, pemerintah Orde Baru menganggap apabila politik konfrontasi masih bergulir akan menelan biaya yang sangat besar padahal kondisi prekonomian Indonesia pada saat itu masih mengalami kelesuan (Arifin, et al, 2018).

Berakhirnya konfrontasi dengan Malaysia menjadi faktor penting terjalinya kembali hubungan Indonesia dengan negara blok barat terutama dengan Amerika Serikat dan Inggris, dengan negara-negara Asia Afrika dan Non Blok dijalin persahabatan yang lebih erat. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat pada pemerintahan Orde Baru memang sangat baik dan negara ini merupakan salah satu penyumbang penting dalam bidang ekonomi Indonesia.

“Ketika Soeharto berkuasa kondisi Ekonomi di Indonesia porak-poranda dan sangat membutuhkan suntikan dana saat itu Amerika Serikat mau memberikan bantuan dengan satu syarat bahwa Indonesia bersedia mengakhiri konfrontasi (Irshanto, 2019: 96).

Pada masa awal pemerintahan Soeharto kondisi prekonomian Indonesia sedang mengalami guncangan dan membutuhkan banyak bantuan untuk dapat pulih kembali. Amerika Serikat memberikan isyarat untuk menghentikan konfrontasi dengan imbalan bantuan prekonomian, tentu saja Indonesia kala itu sedang membutuhkan bantuan bersedia untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dengan Malaysia. Hal ini membuat mengalirlah bantuan maupun kerja sama di bidang ekonomi dari beberapa negara blok Barat seperti Amerika Serikat.

Hubungan Indonesia dan Malaysia kembali terjalin sesaat setelah keputusan normalisasi hubungan kedua negara disepakati. Agenda kerjasama mulai dipupuk salah satunya adalah pembentukan *ASEAN (Association of South East Asia Nations)* pada tahun 1967 bersama tiga negara Asia Tenggara lainnya, yakni Singapura, Thailand dan Filipina. Arti pentingnya netralitas kawasan guna mendukung stabilitas kawasan yang sejajar dengan stabilitas dalam negeri dan pandangan yang sama terkait ancaman komunisme merupakan agenda utama kebijakan luar negeri kedua negara tersebut (Sunarti, 2014).

Rehabilitasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia merupakan prioritas utama untuk sektor politik luar negeri Soeharto, dalam persepsi Soeharto, politik konfrontatif dan mercusuarinya Soekarno memerikan dampak negatif termasuk kemerosotan ekonomi, hubungan dengan negara tetangga

yang tidak harmonis dan terisolasi dari pergaulan Internasional. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia harus kembali memubuka diri merajut hubungan baik dan mengadakan kerjasama dengan negara-negara lain, terutama dikawasan regional. Terciptanya hubungan baik akan menghasilkan keadaan yang stabil dan damai, sehingga pembangunan nasional dapat terlaksana melalui kerjasama dengan negara lain (Hatta, 1965).

## **2. Kerjasama Asia Tenggara**

Setelah keluar dari tragedi tahun 1965, Indonesia telah mengalami perubahan politik luar negerinya. Pendekatan dan persepsi baru dalam kebijaksanaan politik luar negeri ini berpedoman pada dua hal pokok. Pertama, kepentingan nasional yang diperhitungkan secara realistis. Kepentingan nasional Indonesia itu antara lain mengatasi masalah ekonomi. Kedua, kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam dunia internasional yang dapat digunakan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, termasuk perannya dalam menjaga perdamaian dunia. Dengan politik luar negeri yang baru itu, Indonesia akan bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia, dengan organisasi-organisasi dan badan-badan internasional yang ada, demi kepentingan nasional Indonesia untuk menanggulangi kesulitan ekonomi (sabir, 1987).

Kepemimpinan Soekarno yang mulai runtuh dan digantikan dengan Soeharto, membuat kebijakan luar negeri Indonesia mengalami perubahan khususnya terhadap kawasan Asia Tenggara. Kebijakan luar negeri Indonesia kala itu memberikan prioritas terhadap Asia Tenggara dan memperbaiki hubungan bilateral dengan berbagai pihak Internasional. Politik luar negeri Indonesia diimplementasikan untuk mendorong lahirnya kerjasama antar negara khususnya dikawasan Asia Tenggara. Dikutip dari Arifin, et al (2018: 109), Presiden Soeharto menyampaikan pidatonya didepan Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 Agustus sebagai berikut:

“Apabila masalah Malaysia ini telah diselesaikan, kita dapat mengarah ke arah kegiatan-kegiatan dalam bidang kebijaksanaan luar negeri yang menjalin kerjasama yang erat berdasarkan prinsip saling menguntungkan antara negara-negara Asia Tenggara. Kemudian akan menghidupkan kembali gagasan mafilindo dalam lingkup yang lebih luas untuk mencapai suatu Asia Tenggara yang bekerjasama dalam berbagai bidang, terutama bidang-bidang ekonomi, tehnik dan budaya”.

Dari pidato Soeharto, dapat diambil pengertian bahwa Indonesia dibawah pemerintahan Orde baru berupaya untuk mengagas kembali Mafilindo yang

merupakan embrio terbentuknya ASEAN, Soeharto berpendapat bahwa kerjasama Asia Tenggara dapat dibentuk untuk mencapai kepentingan bersama berdasarkan prinsip saling menguntungkan, terutama dalam bidang ekonomi yang merupakan akar dari kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam tubuh bangsa Indonesia.

Keinginan tersebut terwujud ketika pada tanggal 8 Agustus 1967 berhasil di tandatangani deklarasi Pembentukan *Association Of South East Asian Nations (ASEAN)*. Kerjasama dengan berbagai bangsa mulai dipupuk seluas mungkin dengan prinsip saling menghormati dan hidup bertetangga yang baik dengan tidak menghentikan untuk terus berperan penting dalam usaha untuk mewujudkan tatanan dunia yang sejahtera penuh perdamaian. Terciptanya suatu lingkungan regional yang kondusif merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia, hal ini penting karena indonesia membutuhkan adanya lingkungan yang relatif stabil yang dapat membuat indonesia berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi domestik.

“Yang dilakukan indonesia untuk menciptakan lingkungan regional yang kondusif adalah dengan melibatkan diri dalam pembentukan wadah kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara. Kerjasama regional tersebut terwujud dalam institusi *Association Of South East Asian Nations (ASEAN)*” (Arifin, et al, 2018: 110).

Melibatkan diri dalam rencana pembentukan sebuah organisasi Asia Tenggara merupakan kebijakan yang diambil pemerintahan Orde Baru untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam lingkungan regional Asia Tenggara, hanya dengan lingkungan regional yang kondusif Indonesia dapat berkonsentrasi untuk menata kehidupan politik dan ekonominya yang tengah terpuruk. Oleh karena itu tidak heran jika ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Hal ini sebagai bagian dari kepentingan Nasional yang terumus dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Kerjasama dengan Negara-negara kawasan ini mulai dibudidayakan seluas-luasnya berdasarkan prinsip saling menghormati hidup bertetangga baik tanpa berhenti dan terus memainkan peran dalam upaya mencapai tatanan dunia yang mewujudkan perdamaian yang abadi. Keterlibatan Indonesia dalam Organisasi Regional ASEAN bukan berarti telah menyimpang dari prinsip politik Bebas dan Aktif, ASEAN bukanlah sebuah pakta militer seperti SEATO. Berdirinya ASEAN diharapkan Negara-negara anggotanya mampu membentuk suatu pandangan politik yang sejalan atau setidaknya berkesinambungan dalam

menanggapi persoalan-persoalan diluar maupun didalam Negeri (Notosusanto, 1992).

### **3. Pemutusan Hubungan Diplomatik Indonesia-Cina**

Pergantian rezim kepemimpinan suatu negara senantiasa berpengaruh pada perubahan kebijakan luar negeri di negara tersebut. Begitu pula yang terjadi dengan Indonesia pasca jatuhnya Soekarno, yang digantikan oleh Soeharto. Perubahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemikiran awal yang disampaikan oleh Suharto dalam pidatonya di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada 1966 yang memuat dua hal utama yaitu stabilitas politik keamanan dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik, tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Politik Luar Negeri Indonesia setelah Soeharto menduduki kekuasaan berbeda secara drastis dengan ketika dibawah Soekarno. Pada awalnya ada kecenderungan untuk bergerak mendekati Barat, dan ini terbukti melalui hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan sikapnya dengan Negara-negara komunis (Suryadinata, 2019: 46).

“Pada tanggal 1 Oktober 1967 dengan membekukan hubungan diplomatik dengan Cina karena keikut campuran mereka dalam memberikan bantuan kepada G30S, dan memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh G30S” (Sudirman, 2014: 423).

Keberpihakan Indonesia terhadap Barat tidak bisa dilepaskan dari mendesaknya kebutuhan ekonomi pada saat itu sehingga Soeharto berupaya mencari bantuan luar negeri ke negara-negara Barat. Dari kondisi-kondisi seperti itu, dapat dilihat bahwa segera setelah Soeharto berkuasa Indonesia mulai meninggalkan politik luar negeri yang cenderung kekiri-kirian. Hal ini tampak dari adanya dugaan akan keterlibatan Cina dalam upaya kudeta yang dilakukan oleh PKI yang berujung pada putusnya hubungan diplomatik dengan Cina pada Oktober 1967. Meskipun demikian, peran Cina dalam kudeta tersebut dinilai masih tetap kabur.

“Alasan pembekuan hubungan dengan Republik Rakyat China karna pemerintah Orde Baru menganggap bahwa Republik Rakyat Cina terlibat dalam Gerakan 30 September. Pemerintah Indonesia juga menganggap bahwa Republik Rakyat Cina sebagai ancaman keamanan nasional” (Arifin, et al, 2018: 108).

Penilaian akan keterlibatan Cina tidak dapat dilepaskan dari adanya fakta akan adanya upaya PKI untuk membentuk Angkatan Kelima, dengan meminta bantuan terhadap Cina atas persetujuan Soekarno. Fakta tersebut membuat

Suharto menilai bahwa Indonesia seharusnya menghindari interaksi dengan Cina demi kebaikan di masa depan. Ini tampak dari pernyataan Suharto dalam pidato kenegaraan pada 1967, dimana pada saat itu ia mengatakan bahwa keterlibatan Cina dalam kudeta tahun 1965 dan dukungan terhadap PKI yang terus berlanjut telah mengakibatkan hubungan tidak normal antara Indonesia dan Cina (Suryadinata, 2019: 132)

“Pembekuan hubungan diplomatik juga merupakan kepentingan nasional untuk menarik perhatian negara-negara barat dengan membangun citra sebagai negara yang anti komunis, sehingga Indonesia berharap mendapat bantuan dan pinjaman luar negeri dari negara-negara barat dan untuk menghindari potensi Indonesia jatuh ke tangan komunis” (Arifin, et al, 2018: 108).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil pengertian bahwa pemutusan hubungan diplomatik dengan Cina tak hanya didasarkan pada tuduhan keterlibatan dalam pemberontakan pada tahun 1965, namun pemutusan hubungan diplomatik juga merupakan kepentingan nasional untuk memperbaiki citra Indonesia sebagai negara yang anti komunis, dengan begitu setelah citra Indonesia kembali baik dimata negara barat diharapkan mengalir bantuan-bantuan yang dapat membantu Indonesia dalam memperbaiki krisis prekonomian yang melanda awal pemerintahan Orde Baru.

Sebelum diputuskannya kebijakan untuk memberhentikan seluruh hubungan diplomatik dengan Tiongkok, mereka menolak dengan keras tuduhan keterlibatan mereka atas gerakan 30 september bahkan Cina mengambil sikap menyebut pemerintahan Soeharto sebagai antek barat sampai menghentikan bantuan ekonomi untuk Indonesia, sikap keras yang ditunjukkan Cina mendapat respon keras oleh masyarakat Indonesia mulai dari munculnya protes dan sentimen negatif yang menyebabkan terjadinya penyerangan terhadap gedung konsulat Cina dan pengerusakan terhadap gedung kedutaan besar Cina di Jakarta pada 24 Maret 1966 (Fauzi, 2014).

Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina berhasil menarik perhatian negara barat untuk kembali berinvestasi di Indonesia yang sempat macet dibawah kepemimpinan Soekarno. Soeharto juga tak punya banyak pilihan, keterbatasan yang dimiliki oleh Indonesia menyebabkan Soeharto harus melakukan program reformasi, program tersebut mendapatkan respon baik dan didukung oleh masyarakat Internasional (Wanandi, 2014).

### **C. Kebijakan Luar Negeri Dibidang Ekonomi**

Soeharto sebagai pemegang kekuasaan selalu menunjukkan peran dominan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan saat itu. Salah satunya kebijakan mengenai resesi yang terjadi di Indonesia yakni tingkat Inflasi yang sangat tinggi yang diwariskan oleh pemerintahan era Soekarno. Berbagai upaya telah direncanakan untuk menanggulangnya ialah stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi dalam negeri. Politik luar negeri digunakan sebagai alat untuk menyelamatkan prekonomian Indonesia seperti yang telah ditekankan oleh MPRS politik luar negeri setidaknya harus memberikan kontribusi positif bagi prekonomian yang menjadi fokus utama untuk ditangani pada era awal Orde Baru. Kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Orde Baru adalah untuk menyelesaikan problematika yang diwariskan Orde Lama antara lain diambil untuk menyelamatkan prekonomian yang lesu pasca berkurangnya peran Soekarno dengan penundaan hutang yang sudah jatuh tempo, dikeluarkannya Undang-undang Penanaman Modal Asing untuk memberi ruang bagi investor menanamkan modalnya di Indonesia dan mencari bantuan atau pinjaman dari negara lain untuk merehabilitasi serta menyelenggarakan pembangunan nasional.

Melalui tiga langkah tersebut, inflasi yang mempengaruhi Indonesia dapat diatasi dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan awal Soeharto, perekonomian Indonesia berada dalam tren positif karena Soeharto memimpin komitmen negara dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat pada saat Soeharto dengan sigap merencanakan pembangunan lima tahun atau biasa disebut Pelita, dari sinilah julukan bapak pembangunan melekat pada diri Soeharto.

#### **1. *Rescheduling* Hutang Luar Negeri Indonesia**

Lahirnya orde baru merupakan sebuah harapan bagi Indonesia untuk menciptakan prekonomian yang sehat dan stabilitas keamanan yang baik. Dalam situasi yang sedemikian gawat setelah pecahnya G30S/PKI rakyat Indonesia mengeluarkan suara melalui tiga tuntutan rakyat (tritura), yang dipelopori oleh mahasiswa dan pemuda. Perbaikan dalam bidang prekonomian, yang mengalami kelesuan pada masa Orde Baru ditandai dengan inflasi mencapai 650%, masalah yang terjadi pada awal kepemimpinan Soeharto tidak hanya sebatas Inflasi dan pemenuhan tuntutan rakyat saja namun masalah hutang luar negeri yang harus dibayar. Dikutip dari Susanti (2016: 270) menyatakan bahwa :

“Pada 1966, Indonesia juga dihadapkan dengan masalah beban pelunasan hutang luar negeri yang jatuh tempo. Demokrasi Terpimpin menciptakan hutang luar negeri yang berjumlah \$ 2.358 juta. Hampir 42 persen kepada Uni Soviet; hampir 10 persen kepada Jepang dan 7,5 persen kepada Amerika Serikat. Pembayaran kembali hutang tersebut dijadwalkan selama tujuh tahun. Pada 1966 harus membayar kembali \$530 juta hutang luar negeri dan \$ 270 juta dalam tahun 1967. Jumlah hutang tersebut belum termasuk beban kompensasi program nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia”.

Hutang yang tercipta pada masa demokrasi terpimpin sangat amat besar mencapai 2,3 juta dolar, hutang tersebut berasal dari Amerika Serikat, Jepang dan Uni Soviet, pada era demokrasi terpimpin keadaan moneter mengalami kelesuan terlebih Indonesia dihadapkan dengan pembebasan Irian Barat yang jelas membutuhkan banyak biaya untuk operasionalnya saja, hal tersebut membuat hutang luar negeri tercipta khususnya kepada Uni Soviet. Ketersediaan dana merupakan akar dari masalah pembayaran hutang Indonesia kepada negara-negara yang sudah jatuh tempo tersebut.

Pemerintahan Orde Lama meninggalkan banyak problem di bidang ekonomi. Semua ini menjadi prospek utama pemerintahan Orde Baru. Ketika pemerintahan Orde Lama meninggalkan kondisi ekonominya yang rapuh, maka pemerintahan Orde Baru harus berpikir dan berbalik mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah yang melakukan penundaan pembayaran utang negara. Seperti yang dikutip dari Notosusanto (1992:438) menyebutkan bahwa :

“Karena hutang Orde baru berjumlah antara US \$ 2,2-2,7 milyar, Rescheduling dilakukan oleh kabinet Ampera dan Kabinet Pembangunan yang menggantikannya. Situasi ekonomi dan keuangan yang parah menyebabkan pemerintah berusaha meminta kepada negara-negara kreditor agar dapat menunda pembayaran kembali hutang-hutang itu”.

Hutang peninggalan Orde Lama terhadap negara kreditor sangat besar, dan sudah jatuh tempo pada saat pemerintahan Orde Baru terbentuk. Kondisi prekonomian awal pemerintahan yang mengalami kelesuan, maka dari itu sejak permulaan tahun 1966 pemerintah berusaha untuk memperoleh persetujuan para kreditor untuk bersedia menanggukuhkan pembayaran utang-utang tersebut.

Pada tanggal 19 hingga 20 September 1966, telah diadakan sebuah perundingan yang membahas tentang penundaan pembayaran hutang luar negeri Indonesia dengan negara kreditor di Tokyo, Jepang. Negosiasi tersebut kemudian dilanjutkan di Paris, Prancis, dan membuahkan kesepakatan. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan dalam penundaan pembayaran utang

luar negeri Indonesia (Sudirman, 2014). Dikuip dari Notosusanto (1992: 438) mengemukakan bahwa :

“Pada kesempatan itu pihak pemerintah Indonesia mengemukakan bahwa devisa ekspor sebagai pembayar hutang, tetapi perlu dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku, sparepart dan sebagainya sehingga ekonomi menjadi lebih baik”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil pengertian bahwa anggaran pembayaran hutang Indonesia yang sudah jatuh tempo sudah dipersiapkan dan direncanakan dengan menggunakan anggaran devisa, namun Indonesia pada pertemuan di Tokyo Jepang mengemukakan anggaran yang sebelumnya sudah direncanakan dialokasikan untuk mendatangkan bahan-bahan baku dan sparepart.

## **2. Ditetapkannya Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA)**

Mengingat kembali bahwa pada masa pemerintahan Soekarno merupakan pemerintahan yang memiliki semangat nasionalisme yang sangat tinggi, semangat nasionalisme berjalan beriringan dengan sikap benci terhadap kapitalisme dan anti asing, tentu saja sikap tersebut membuat kapital asing sulit untuk masuk dalam tubuh ekonomi nasional. Namun sikap itulah yang nantinya menjadi senjata makan tuan masa pemerintahan Orde Lama. Orde Lama harus jatuh sebagai konsekuensi dari sikapnya yang mengisolasi dari modal asing, pilihan yang tetap teguh dengan tidak bekerjasama dengan modal asing ditengah kondisi prekonomian yang buruk pada akhirnya menunjukkan praktik ekonomi besar pasak dari pada tiang. Sikap tersebut merupakan salah satu faktor ekonomi Indonesia pada masa Soekarno mengalami stagnansi. Maka dari itu pemerintahan Soeharto secara perlahan mulai meninggalkan sikap pendagulunya itu. Dikutip dari Susanti (2016: 780) menyatakan bahwa :

“Adapun langkah yang dipilih Orde baru adalah menerapkan strategi *outward looking*, yaitu membuka diri seluasluasnya terhadap hubungan ekonomi internasional, mengintegrasikan perekonomian Indonesia dengan sistem kapitalis, dan membuka kembali perekonomian terhadap penetrasi modal asing”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil pengertian bahwa pemerintahan Orde Baru lebih bersikap rasional dan realistis. Berkaca pada konsekuensi dari ekonomi terpimpin yang secara nyata membuktikan sulitnya membangun ekonomi dengan cara menutup diri dari modal asing membuat pemerintahan Orde Baru peka terhadap problematik yang terjadi pada sektor ekonomi. Orde Baru yang bersikap rasional dan reaslistis berfikiran

pembangunan tak akan pernah terlaksana tanpa adanya modal, sedangkan modal saat itu sulit didapat jika hanya dengan mengandalkan ekonomi dalam negeri. Senada dengan hal tersebut Suryadinata (2019: 45) menyatakan bahwa “Pemerintahan baru dibawah kepemimpinannya memperkenalkan kebijakan politik pintu terbuka, dimana investasi asing ditingkatkan dan bantuan pinjaman dibutuhkan untuk merehabilitasi ekonomi Indonesia”.

“Demikian pula untuk menaggulangi kemerosotan ekonomi pada tanggal 10 Januari 1967 pemerintah mengesahkan dan menetapkan mulai berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1967 yang menyangkut tentang Penanaman Modal Asing” (Notosusanto, 1992: 434).

Atas dasar pemikiran ekonomi yang rasional dan realistis, maka pemerintah yang baru menampakkan sikap yang baru pula. Mengambil sikap yang berbeda, masalah modal asing yang senantiasa dipandang sebagai penghisap dan senantiasa merugikan di masa lalu, berbalik dipandang sebagai sebuah faktor yang penting bagi upaya penyelamatan krisis ekonomi yang mendera di awal-awal pemerintahan Orde Baru. Dalam upaya untuk mengatasi resesi ekonomi para perumus kebijakan ekonomi Orde Baru segera membuat aturan mengenai penetrasi modal asing dalam sistem prekonomian Indonesia. setelah ketetapan MPRS No. XXIII terbentuk maka aturan tentang modal asing secara resmi ditetapkan. Senada dengan hal itu Rizki (2013: 231) menyatakan bahwa :

“Untuk memperbaiki keadaan ekonomi memerlukan pembiayaan dan modal yang besar. Modal dan pembiayaan tersebut dapat didapatkan melalui pinjaman, bantuan asing dan investasi asing. Namun yang lebih efisien adalah melalui investasi asing secara langsung, karena dapat menciptakan lapangan kerja untuk penduduk Indonesia tanpa pemerintah mengeluarkan pembiayaan dan proyek yang besar”.

Munculnya Undang-Undang Nomor 1 tentang PMA (Penanaman Modal Asing) tahun 1967 jelas membuka pintu bagi upaya pemerintah untuk menyambut penanaman modal asing ke Indonesia. Menurut pemerintah, masuknya PMA akan menguntungkan Indonesia dalam dua hal yakni menciptakan investasi baru tanpa modal belanja pemerintah, dan faktor ini menjadi kendala terpenting dan menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia. Di sisi penawaran, investasi ini akan menyediakan berbagai produk untuk konsumsi masyarakat, sedangkan di sisi permintaan, investasi akan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga meningkatkan pendapatan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pertemuan antara kedua indikator inilah

yang akan terus mendorong berputarnya roda prekonomian Indonesia yang berkesinambungan.

Undang Undang yang disahkan pada tanggal 10 Januari 1967 tersebut membuka ruang yang sebesar-besarnya bagi orang asing untuk membangun perusahaan di Indonesia. Dengan lahirnya Undang Undang Penanaman Modal Asing, Indonesia berada dalam kondisi terbuka untuk pemodal asing untuk investasi di Indonesia. Guna menyempurnakan usaha pemulihan ekonomi serta mempersiapkan landasan pembangunan, pemerintah segera mengeluarkan Rencana Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN 1968), menjadi Undang-undang No. 13 tahun 1967. Undang-undang ini disahkan sebelum tahun anggaran dimulai. Dalam hal ini pemerintah Orde Baru menggunakan sistem Anggaran berimbang, prinsip ini berarti dimana besarnya anggaran belanja negara berimbang dengan pendapatan negara. Dengan APBN tersebut pemerintah mengambil kebijakan bahwa hasil pendapatan pemerintah digunakan untuk belanja rutin, sedangkan bantuan luar negeri digunakan untuk belanja pembangunan (Notosusanto, 1992).

Pemulihan ekonomi era Soeharto merupakan agenda pemerintah yang bertujuan untuk menyelamatkan perekonomian. Stabilitas ekonomi difokuskan dalam mengendalikan inflasi, sehingga komoditas tidak terus naik. Sementara itu, pemulihan ekonomi merupakan wujud nyata dari perbaikan sarana dan prasarana ekonomi dengan fokus pada pencapaian sistem ekonomi yang terencana, menjamin pembangunan ekonomi dan demokrasi yang berkelanjutan, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (Sudirman, 2014).

### **3. Bantuan Luar Negeri**

Menjaga kemandirian serta menjaga politik dalam negeri merupakan agenda yang dijalankan pemerintahan era Soekarno, sehingga pembangunan ekonomi seolah dipandang sebelah mata. Hasilnya ialah beberapa guncangan ekonomi yang melanda tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintahan Orde Lama. Pemerintah mungkin tidak menyadari bahwa negara yang kuat dalam sektor ekonomi dapat memberikan pengaruh luar biasa bagi negara untuk mampu berkembang dan memiliki daya saing tinggi dengan negara-negara lainya.

Melalui kebijakan politik luar negeri inilah pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan berbagi negara di dunia, sehingga membuka diri tersebut

pemerintah memperoleh berbagai macam kemudahan dalam berbagai bidang sosial ekonomi, khususnya dalam bidang ekonomi Indonesia mampu untuk membangun negara di bawah kepemimpinan Orde Baru itu semua akibat dari politik luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah era Soeharto. Dari sinilah perubahan besar dilakukan oleh Soeharto, politik luar negeri Indonesia diaplikasikan untuk membuka ruang kerjasama bilateral maupun multilateral dengan berbagai negara di dunia. khususnya pada sektor ekonomi pemerintah memperoleh berbagai macam kemudahan dalam berbagai bidang setelah memutuskan untuk membuka diri terhadap dunia Internasional.

Awal pemerintahannya Soeharto lebih dahulu melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, sosial dan politik. Sasaran dari kebijakan itu ialah menekan tingkat inflasi, memperbaiki defisit anggaran pemerintah dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnansi pada era sebelumnya. Upaya pemerintah tersebut diperkaya dengan rencana pembangunan lima tahun (Rapelita) dengan terget yang jelas. Rencana tersebut mendapatkan respon baik oleh negara- negara barat hal ini dibuktikan dengan terbentuknya sebuah perhimpunan yang disebut *Intergovernment Group On Indonesia (IGGI)* yang bertujuan untuk membiayai sebagian besar pembangunan ekonomi dalam negeri (Hasang dan Nur, 2020).

Setelah teratasinya masalah penundaan pembayaran hutang, maka hal lain yang juga mendesak bagi Indonesia pada masa itu ialah bagaimana mendapatkan bantuan baru dari Negara-negara yang sebelumnya berada pada pertemuan Tokyo dan Paris Club tersebut. Dikuip dari Notosusanto (1992: 439) menyatakan bahwa :

“Perundingan diantara beberapa negara maju dilanjutkan di Amsterdam pada 23-24 Februari 1967 untuk membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan-kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat-syarat lunak. Pertemuan itu kemudian dikenal dengan nama *Intergovernment Group On Indonesia (IGGI)*”.

Melalui pertemuan yang diadakan di Amsterdam belanda itu pemerintah mengupayakan bantuan luar negeri bagi Indonesia, disamping membicarakan penanguhan pembayaran hutang-hutang yang sebelumnya telah diadakan di Tokyo pada 19-20 september 1966, bantuan luar negeri tersebut diterima apabila tidak melampaui batas kemampuan untuk membayarkannya kembali, maka dari pada itu pemerintah pada pertemuan Amsterdam mengupayakan bantuan luar

negeri dengan syarat-syarat lunak. Dikutip dari Sabir (1987: 204) menyatakan bahwa :

“Setelah menyadari Indonesia dibawah Orde baru mempunyai prospek-prospek besar dalam pembangunan ekonomi, jika cukup dana tersedia maka mereka bersedia pula untuk memberikan hutang baru, atas dasar rumusan 1/3 Amerika Serikat, 1/3 Jepang, 1/3 Eropa Barat”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil pengertian program pembangunan yang dicanangkan pemerintahan Orde Lama disambut baik oleh negara-negara kreditur yang tergabung dalam *Intergovernment Group On Indonesia (IGGI)* tersebut. Anggaran-anggaran ini lah yang nantinya dipakai salah satunya untuk membiayai perogram pembangunan pemerintah yakni Rapelita.

“Meningkatnya ketergantungan pada sumber-sumber dana asing selama masa-masa awal Orde Baru dapat dilihat dalam fakta bahwa masa tiga perempat Repelita I (1969-1974) didanai oleh pinjaman asing, yang tumbuh hingga US\$ 877 juta di tahun terakhir (1974)” (Masitho, 2013: 120)

Tujuan pembangunan lima tahun yang dimulai pada 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974 adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus meletakkan dasar bagi pelita selanjutnya. Konsep yang dirancang dalam pelita pertama ditujukan pada sektor ekonomi, 78,28% digunakan untuk sektor irigasi dan pertanian, sisanya ditujukan untuk sektor lain seperti bidang sosial dan bidang umum. Orde Baru merancang berbagai kebijakan untuk mendapatkan dana, karena biaya yang diperlukan untuk program lima tahunan tersebut sangatlah besar, maka dibutuhkan bantuan dari luar negeri untuk mensukseskan program pembangunan tersebut (Hasan, 2014).

Dapat dikatakan bahwa program pembangunan lima tahunan tersebut berjalan dengan lancar terbukti bahwa rapelita telah bergulir sebanyak 6 kali, dan rencana pembangunan tersebut juga membuat Indonesia menjadi mandiri dari sinilah julukan bapak pembangunan melekat kuat pada diri Soeharto.

#### **D. Segi Pedagogis**

Dari penjabaran diatas dapat digambarkan bahwa seluruh keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah bukan berdasarkan kepentingan pribadinya namun seluruh kebijakan diambil atas dasar kepentingan Nasional atau berdasarkan kepentingan khalayak ramai, nilai-nilai yang dapat diambil dari kebijakan Orde Baru dalam kancah Internasional tersebut adalah :

### **1. Mengedepankan Musyawarah**

Pemerintahan Orde Baru dibawah Soeharto lebih bersifat "Low Profile" dan mengedepankan perundingan untuk mencapai kesepakatan hal tersebut dicerminkan saat terjadi konflik Indonesia dan Malaysia pada masa pemerintahan Soekarno yang bersifat Militansi anti neokolim mulai ditinggalkan pada era Orde Baru, walaupun sudah beberapa kali diadakan perundingan yang tidak berujung, Orde Baru bekerja keras untuk melakukan perundingan dengan Malaysia melalui perundingan diadakan di Bangkok dari 29 Mei hingga 1 Juni 1966. Dan pada akhirnya ditanda tangani perjanjian perdamaian di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966. Hal ini dilakukan untuk menjaga prinsip bertetangga baik dan tidak agresi sesuai dengan prinsip bebas dan aktif.

### **2. Kooperatif dan mampu bekerjasama**

Politik luar Negeri Indonesia pada masa Orde Baru dimanifestasikan dengan kerjasama regional antar negara kawasan guna tercapainya kepentingan Nasional dan mendongkrak rasa solidaritas antar negara. Hal tersebut terbukti Pada tanggal 5 sampai 8 Agustus 1967 diadakan pertemuan di Bangkok, pertemuan para menteri luar negeri dari 5 negara Sebagai hasil pertemuan pada tanggal 8 Agustus 1967, telah ditandatangani deklarasi yang disebut "Deklarasi Bangkok", yang merupakan kesepakatan lima negara untuk membentuk organisasi kerja sama regional bernama ASEAN.

### **3. Komunikatif**

Masuknya Indonesia dalam Organisasi PBB setelah ditinggalkan sejak 1 Januari 1965, membuka kembali tirai yang membuat Indonesia kesulitan dalam pergaulan Internasional. Maka dari itu pada 28 September 1966 Indonesia secara resmi masuk kembali sebagai anggota PBB tindakan pemerintahan Indonesia tersebut mendapat dukungan penuh dari berbagai negara dunia seperti Aljazair, Jepang, Filipina, Pakistan, Mesir, dan Thailand. Tindakan tersebut mencerminkan bahwa Indonesia era Orde Baru memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan negara lain.